



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SUB UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRASETIYO ICHTIARTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 413327

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.170.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m²/10 m² di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m²/95 m² di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m²/89 m² di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/108 m² di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 181.250.000**

1. MOBIL, TOYOTA TGN40R-GKMDKD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FL125 RCD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.800.000
3. MOTOR, HONDA NF125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000
4. MOTOR, SUZUKI SHOGUN/FD110 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 62.500.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 77.688.657****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.491.438.657
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.491.438.657

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.